

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Endowment funds merupakan dana abadi yang dikumpulkan dari donasi dan diinvestasikan secara profesional untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi lembaga nonprofit seperti universitas atau yayasan, dengan prinsip utama pelestarian pokok dana sambil memanfaatkan imbal hasil untuk mendukung operasional, beasiswa, dan program jangka panjang. Mekanisme ini memastikan kemandirian finansial lembaga, di mana hanya pendapatan investasi yang digunakan sementara pokok dana tetap utuh untuk generasi mendatang (Kolek et al., 2022).

Endowment funds telah menjadi instrumen pendanaan strategis di berbagai negara untuk menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi. Di Amerika Serikat, *Harvard University* mengelola dana abadi sebesar USD 53,2 miliar pada 2024 yang membiayai sekitar 35% kebutuhan operasional melalui portofolio investasi yang terdiversifikasi (National Center for Education Statistics, n.d.). *Yale University* juga menunjukkan kontribusi signifikan endowment dengan nilai USD 42,3 miliar pada 2023 yang menyokong 33% pengeluaran institusi dari hasil investasi saham dan real estate (PitchBook, 2025; Yale News, 2024). Di Australia, *University of Melbourne* memperoleh pendapatan AUD 3,2 miliar yang sebagian besarnya berasal dari investasi *private equity* pada sektor

teknologi dan bioteknologi untuk mendukung pengembangan infrastruktur akademik (Private Equity International, n.d.) . Sementara itu, Malaysia melalui PTPTN telah menyalurkan lebih dari RM71 miliar pinjaman pendidikan hingga 2024 kepada lebih dari 3,7 juta penerima disertai perluasan program tabungan pendidikan nasional (Bernama, 2025). Secara keseluruhan, berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa *Endowment funds* dan skema pendanaan berkelanjutan berperan penting dalam memperkuat kapasitas lembaga pendidikan tinggi, mendukung stabilitas pendanaan jangka panjang, serta memastikan keberlanjutan program akademik, riset, dan beasiswa.

Berdasarkan *Human Capital Index* (HCI) 2023, Indonesia hanya mencatat skor 0,53, tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam (0,67) dan Malaysia (0,61), serta sangat jauh di bawah Singapura (0,88), menunjukkan bahwa seorang anak Indonesia hanya akan mencapai 53% potensi produktivitasnya ketika dewasa. Problem struktural ini diperparah oleh rendahnya capaian pembelajaran: laporan *World Bank Learning Poverty* 2023 menunjukkan bahwa 52% anak Indonesia usia 10 tahun tidak dapat membaca dengan pemahaman dasar, mengindikasikan defisit literasi fundamental yang menghambat pengembangan keterampilan tingkat lanjut. Sementara itu, laporan UNDP *Human Development Report* 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 117 dunia (HDI 0,710), tertinggal dari hampir seluruh negara ASEAN utama, mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja secara agregat.

Ketimpangan kualitas SDM di Indonesia tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga sangat mencolok secara geografis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih berada di kisaran 60–65, jauh di bawah rata-rata nasional 74,39. Kesenjangan ini mencerminkan realita bahwa pembangunan SDM Indonesia belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera (Santoso et al., 2024).

Memasuki era 2025, ketika perekonomian global bergerak cepat menuju digitalisasi dan otomatisasi, ketertinggalan ini menjadi ancaman strategis: Indonesia berisiko gagal memanfaatkan bonus demografi dan kehilangan posisi kompetitif di kawasan Asia. Karena itu, penguatan SDM melalui pendidikan tinggi, pemerataan kesempatan belajar, serta program beasiswa yang akuntabel dan tepat sasaran bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan mendesak untuk menutup kesenjangan kompetensi dan mempercepat transformasi SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebuah skema dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dirancang untuk menyediakan pembiayaan pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan talenta nasional melalui mekanisme investasi jangka panjang. LPDP diposisikan bukan sekadar sebagai program beasiswa, tetapi sebagai moto strategis pembangunan SDM unggul, mengingat dana pokoknya dijaga agar tetap utuh sementara hasil pengembangannya digunakan untuk mendanai beasiswa bagi putra-putri terbaik bangsa.

Dana abadi Pendidikan terbentuk pada 2012, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, mencerminkan komitmen fiskal pemerintah dalam membangun SDM unggul. Berdasarkan laporan resmi Kementerian Keuangan dan LPDP, total dana abadi yang awalnya hanya sekitar Rp1 triliun pada 2012, meningkat menjadi Rp99,1 triliun pada 2015, kemudian Rp119,1 triliun pada 2018, dan melonjak tajam hingga mencapai Rp139,4 triliun pada 2023. Per 31 Desember 2024, aset dana abadi pendidikan mencapai kisaran $\pm$ Rp159 triliun, menjadikannya salah satu *endowment fund* pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini berasal dari penambahan alokasi APBN, hasil pengembangan investasi, serta optimalisasi portofolio keuangan yang dikelola secara profesional oleh Kementerian Keuangan.

Berikut adalah data statistik mengenai pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selama periode tahun 2020 hingga 2024, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Tabel Perkembangan Dana Abadi LPDP Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Investasi Jangka Pendek + Investasi Jangka Panjang	Pendapatan Operasional	Belanja Barang dan Jasa
1	2020	64.306.443.890.000	4.078.787.325.893	2.089.913.983.750
2	2021	102.453.865.059.980	4.595.648.535.654	2.731.558.526.301
3	2022	123.743.543.666.335	6.585.431.162.451	4.455.308.560.872
4	2023	142.032.215.547.000	9.296.514.384.362	9.081.920.010.812
5	2024	116.927.032.722.804	10.972.947.228.154	11.586.669.474.652

Sumber : Laporan Keuangan LPDP

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa pengelolaan dana abadi LPDP menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Nilai total investasi, yang terdiri dari investasi jangka pendek dan jangka panjang, mengalami

peningkatan antara tahun 2020 hingga 2023, dari Rp64,31 triliun menjadi Rp142,03 triliun. Kenaikan ini mencerminkan adanya tambahan dana abadi dan pengelolaan investasi yang relatif efisien. Namun, di tahun 2024, nilai investasi mengalami penurunan menjadi Rp116,93 triliun, yang menandakan adanya penyesuaian dalam portofolio atau realisasi pemanfaatan dana untuk mendukung pelaksanaan program LPDP.

Pendapatan operasional LPDP selama periode yang diamati menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, dari Rp4,08 triliun di tahun 2020 menjadi Rp10,97 triliun pada tahun 2024. Keadaan ini menunjukkan bahwa manajemen dana abadi berhasil memberikan hasil yang berkelanjutan meskipun ada fluktuasi dalam nilai investasi di akhir periode. Di sisi lain, pengeluaran untuk barang dan jasa juga meningkat, terutama pada tahun 2023 dan 2024, sejalan dengan bertambahnya pelaksanaan program dan kegiatan LPDP. Pada tahun 2024, pengeluaran untuk barang dan jasa tercatat lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional, yang menunjukkan intensitas penggunaan dana abadi untuk membantu pendanaan pendidikan.

Besarnya dana abadi tersebut berdampak langsung pada peningkatan jumlah penerima beasiswa. Hingga 2024, LPDP telah menyalurkan lebih dari 44.000 beasiswa untuk studi magister, doctoral, spesialis, vokasi, hingga program afirmasi dan beasiswa targeted untuk bidang strategis seperti kesehatan, teknologi, dan riset (Zulfikar, 2025). Di antara berbagai skema yang dikembangkan LPDP, Beasiswa Afirmasi menempati posisi yang secara kebijakan sangat strategis. Beasiswa ini dirancang khusus untuk menjangkau

kelompok yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan tinggi berkualitas, yakni masyarakat dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyandang disabilitas, serta kelompok prasejahtera. Dalam kerangka kebijakan LPDP, beasiswa afirmasi mencakup beberapa skema, di antaranya Beasiswa Daerah Afirmasi, Beasiswa Prasejahtera, Beasiswa Putra Putri Papua dan Beasiswa Penyandang Disabilitas, yang masing-masing memiliki kriteria khusus dan jalur seleksi tersendiri guna memastikan keterjangkauan bagi kelompok rentan (Beasiswa Daerah Afirmasi 2025, n.d.).

Urgensi beasiswa afirmasi semakin menguat mengingat data menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat timpang secara geografis dan sosial-ekonomi. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara nasional pada tahun 2023 berada di angka 31,45%, namun APK di wilayah Papua dan Papua Pegunungan hanya mencapai sekitar 12–15%, jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, kelompok rentan akan terus terpinggirkan dari akses pendidikan tinggi (Santoso et al., 2024).

LPDP dirancang sebagai instrumen yang inklusif, pelaksanaan LPDP dalam praktiknya menunjukkan adanya beragam kritik yang mencerminkan kesenjangan antara harapan dan realisasi program. Kritik tersebut muncul dari berbagai kalangan, salah satunya dari anggota DPR RI, Primus Yustisio. Primus menilai bahwa proses seleksi LPDP masih “rumit”, “berbelit”, serta belum memberikan kepastian alur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ia

juga menyebut bahwa beasiswa ini tampak lebih mudah diakses oleh “kalangan tertentu,” mengisyaratkan adanya ketimpangan akses antar-lapisan masyarakat. Selain persoalan kesulitan administrasi, Primus menyoroti minimnya keterbukaan data mengenai profil penerima beasiswa. Ia mempertanyakan sejauh mana beasiswa tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, mengingat publik tidak mendapatkan gambaran utuh tentang latar belakang ekonomi atau daerah asal penerima. Kritik ini menegaskan adanya tuntutan publik terhadap transparansi yang lebih kuat dalam proses seleksi maupun publikasi data penerima beasiswa (Nurhadi, 2025). Isu transparansi tidak hanya datang dari anggota legislatif. Tempo juga memberitakan adanya sorotan terhadap proses seleksi LPDP yang dianggap menyimpan potensi ketidakjelasan. Pemberitaan tersebut menggambarkan kegelisahan Sebagian masyarakat terhadap mekanisme penilaian, alur pengumuman, hingga prosedur verifikasi yang dinilai tidak sepenuhnya terbuka (tempo, 2025). Kritik-kritik ini memperlihatkan bahwa LPDP berada dalam tekanan untuk memastikan proses seleksi yang adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjangkau berbagai kelompok, bukan hanya mereka yang sudah memiliki modal sosial atau pendidikan lebih baik.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah pemerataan akses geografis. Meski LPDP dimaksudkan untuk seluruh warga negara, kenyataannya akses untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih menjadi persoalan serius. Dalam pernyataan resmi yang diberitakan situs partai NasDem, Charles Meikyansyah menegaskan bahwa anak-anak di wilayah 3T menghadapi

hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, akses informasi, hingga syarat seleksi yang dianggap terlalu berat jika disamakan dengan peserta dari kota besar. Ia meminta adanya perbaikan kebijakan afirmasi yang benar-benar memberikan kesempatan bagi putra-putri dari wilayah 3T untuk bersaing secara adil. Seruan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tinggi melalui LPDP belum sepenuhnya tercapai (Nasdem, 2025). Dalam konteks ini, LPDP menghadapi tantangan bagaimana menyeimbangkan standar seleksi nasional dengan kondisi nyata di daerah yang infrastrukturnya jauh tertinggal.

Skala pendanaan LPDP yang besar juga menjadi perhatian bagi Lembaga negara. Dalam rapat yang diberitakan di [web reporter.id](http://webreporter.id) DPD RI membahas capaian LPDP yang telah menyalurkan puluhan ribu beasiswa dengan nilai dana triliunan rupiah, sekaligus menelaah hambatan implementasi program tersebut (Mohammad, 2025). Fakta bahwa lembaga negara menaruh perhatian khusus terhadap LPDP menunjukkan bahwa program beasiswa ini telah menjadi bagian penting dari isu strategis pembangunan nasional. Dengan pengelolaan dana yang besar, LPDP dituntut tidak sekadar menyalurkan beasiswa, tetapi memastikan bahwa hasil akhirnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan negara.

Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah berperan besar dalam membentuk siapa yang mampu bersaing dalam seleksi LPDP. Calon pendaftar dari daerah dengan fasilitas pendidikan unggul, akses internet stabil, dan bimbingan akademik memadai memiliki modal sosial yang jauh lebih kuat

dibandingkan mereka yang berasal dari daerah dengan keterbatasan struktural. Hambatan inilah yang kerap muncul di wilayah 3T, sebagaimana disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansyah, yang menekankan bahwa anak-anak dari daerah 3T kesulitan memenuhi standar seleksi karena fasilitas pendukung tidak setara (Nasdem, 2025). Ketimpangan ini selaras dengan temuan Hayati et al. (2025) yang menunjukkan bahwa meskipun LPDP menyediakan jalur afirmasi, kesenjangan kompetensi dasar antarwilayah tetap besar. Kualitas sekolah, akses informasi, serta kesempatan mengikuti pelatihan praseleksi menjadi faktor yang sangat memengaruhi peluang kelulusan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa tantangan utama akses bukan sekadar kurangnya informasi, tetapi ketidakseimbangan kemampuan dasar akibat ketimpangan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Proses seleksi LPDP yang panjang dan syarat persyaratan administratif menciptakan hambatan bagi calon yang tidak terbiasa dengan birokrasi. Kritik terhadap kerumitan seleksi dan persyaratan yang tidak selalu jelas, seperti disampaikan Primus Yustisio, menunjukkan bahwa beasiswa ini lebih mudah diakses oleh individu yang telah memiliki pengalaman administratif dan dukungan lingkungan yang kuat (Nurhadi, 2025). Kritik tersebut sejalan dengan temuan Putra et al. (2024), yang menyatakan bahwa standar program LPDP belum dirumuskan secara komprehensif sehingga proses seleksi masih menyisakan ruang interpretasi yang luas. Ketidakjelasan indikator penilaian membuat seleksi rentan dipersepsikan tidak konsisten atau tidak transparan. Situasi ini menempatkan kelompok dengan modal sosial rendah dalam posisi

kurang menguntungkan, karena mereka menghadapi hambatan administratif dan psikologis yang tidak dialami oleh peserta dari latar belakang lebih mapan.

Persyaratan seleksi LPDP disusun secara nasional, namun kapasitas akademik calon penerima beasiswa tidak merata. Calon dari kota besar memiliki akses kursus bahasa asing, pembimbing akademik, dan fasilitas persiapan yang jauh lebih lengkap. Sebaliknya, calon dari daerah tertinggal harus berupaya lebih keras untuk memenuhi standar yang sama. Ketidaksesuaian standar inilah yang menyebabkan jalur afirmasi belum menghasilkan pemerataan substantif. Menurut Hayati et al. (2025) menegaskan bahwa kelompok afirmasi membutuhkan intervensi praseleksi seperti pelatihan akademik, peningkatan kapasitas bahasa inggris, mentoring esai, atau pelatihan digital, bukan hanya kuota khusus. Tanpa instrument tersebut, afirmasi cenderung bersifat simbolik dan tidak menyelesaikan akar masalah ketimpangan.

Keseluruhan isu ketimpangan akses geografis, kompleksitas seleksi yang tidak berpihak pada kelompok rentan, keterbatasan afirmasi, serta minimnya transparansi data membentuk pola permasalahan yang saling berkaitan dan menuntut evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi yang komprehensif terhadap program beasiswa afirmasi LPDP menjadi sangat penting mengingat besarnya investasi negara yang dikeluarkan dan tingginya ekspektasi publik terhadap pemerataan akses pendidikan tinggi.

LPDP dibentuk sebagai instrumen strategis pembangunan SDM Indonesia. Namun berbagai temuan menunjukkan adanya ketidaksinkronan

antara mandat kelembagaan dan implementasi di lapangan. Ketika pemerataan akses belum tercapai, seleksi dinilai tidak merata, dan afirmasi belum efektif, maka dampak program sulit tercapai secara utuh. Kajian Hayati et al. (2025) menegaskan bahwa tantangan pemerataan justru memperlihatkan kesenjangan kapasitas antardaerah, menunjukkan bahwa LPDP belum berhasil menciptakan proses yang inklusif secara struktural. Ketidaksinkronan inilah yang menunjukkan bahwa LPDP memerlukan evaluasi dari aspek desain, implementasi, hingga dampaknya.

Pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan suatu program dapat dicapai melalui pendekatan evaluasi yang tidak hanya menilai hasil akhir program, tetapi juga mempertimbangkan proses pelaksanaan serta sumber daya yang digunakan. Salah satu model evaluasi program yang banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (Stufflebeam, n.d.). Model ini menekankan bahwa evaluasi program perlu dilakukan secara sistematis melalui empat komponen utama. Komponen *context* berfungsi untuk menganalisis kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan serta permasalahan yang melatarbelakanginya. Komponen *input* menilai ketersediaan sumber daya, strategi, dan perencanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, komponen *process* digunakan untuk mengkaji bagaimana program dijalankan, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan program. Adapun komponen *product* berfokus pada penilaian terhadap hasil atau dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut. Melalui

pendekatan ini, pelaksanaan suatu program dapat dianalisis secara lebih menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil yang dicapai.

Berbagai penelitian telah membahas program LPDP, tetapi sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada dampak program secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis evaluasi program beasiswa afirmasi LPDP secara komprehensif menggunakan pendekatan model CIPP masih terbatas. Padahal, beasiswa afirmasi memiliki karakteristik, tantangan, dan kelompok sasaran yang berbeda dari skema reguler, sehingga memerlukan evaluasi yang spesifik dan mendalam. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) memungkinkan analisis program dilakukan secara sistematis mulai dari kesesuaian tujuan program, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan program, hingga hasil yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis evaluasi program beasiswa afirmasi LPDP menggunakan model CIPP guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program serta merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kualitas program dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana evaluasi program beasiswa afirmasi LPDP dilihat dari model CIPP yang meliputi aspek *Context, Input, Process*, dan *Product*?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program beasiswa afirmasi LPDP berdasarkan model evaluasi CIPP?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan program beasiswa afirmasi LPDP berdasarkan hasil evaluasi model CIPP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis evaluasi program beasiswa afirmasi LPDP ditinjau dari model CIPP yang meliputi aspek *Context, Input, Process, dan Product*.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program beasiswa afirmasi LPDP berdasarkan model evaluasi CIPP.
3. Untuk merumuskan rekomendasi perbaikan program beasiswa afirmasi LPDP berdasarkan hasil evaluasi model CIPP

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kajian kebijakan pendidikan, khususnya dalam memahami implementasi model CIPP dalam mengevaluasi program beasiswa LPDP. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai analisis implementasi program beasiswa menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Dengan menghadirkan analisis yang komprehensif dan terintegrasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoretis dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan pendidikan serta memperluas pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan suatu program publik dapat berdampak pengembangan sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengelola LPDP, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola LPDP dalam memahami pelaksanaan program

beasiswa dari berbagai sudut pandang, seperti konteks kebijakan, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, serta hasil dari program tersebut. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam memperbaiki manajemen program, memperkuat mekanisme seleksi dan pelaksanaan program, serta meningkatkan sistem pemantauan terhadap para penerima beasiswa.

- b. Bagi Institusi Pendidikan, Penelitian ini mampu menyajikan wawasan terkait pelaksanaan program beasiswa LPDP serta berbagai tantangan yang muncul selama proses pemilihan dan penggunaan beasiswa. Dengan cara ini, lembaga pendidikan bisa merancang pendekatan pendampingan, pengembangan kemampuan akademik, dan layanan persiapan beasiswa yang lebih optimal untuk mahasiswa serta calon pendaftar.

